BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Agen Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi tentang politik. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai partai politik yang tingkatannya berada di Provinsi Jawa Barat merupakan agen utama yang memberikan fungsi pendidikan politik salah satunya yaitu berupa sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang dilaksanakan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat adalah agar terciptanya suatu proses masyarakat untuk memperoleh sikap dan orientasi politik berupa rasa nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban serta dapat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik yang dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik yang ada di masyarakat.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam menentukan sikap politiknya khususnya di Provinsi Jawa Barat yang syarat akan sosial dan budaya yang tinggi, pelaksana atau agen sosialisasi politik tersebut selain dilakukan oleh internal partai PDI Perjuangan yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat juga meliputi masyarakat dalam keluarga, lembaga pendidikan baik formal seperti perguruan tinggi, media massa baik cetak maupun elektronik, kelompok kerja

seperti kelompok buruh, kelompok agama seperti pemuka agama dan yayasan, kelompok kepentingan seperti asosiasi masyarakat dan organisasi masyarakat.

4.1.1 Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen keluarga merupakan bagian terkecil dalam suatu kelompok masyarakat dalam memberikan sosialisasi politik baik dari orang tua seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi dan saudara lainnya. Agen keluarga sangat penting dalam mensosialisasikan politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat di dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam hal penyampaian muatan isi sosialisasi politik kepada lingkungan keluarga terlebih kepada anak-anak dalam pengenalan politik. Transformasi muatan isi politik yang disampaikan dari partai biasanya berisi bahasa dan kata yang hanya dipahami orang dewasa, maka peranan keluarga disini sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, agen keluarga merupakan bentuk pengenalan politik yang pertama sebelum kepada pendidikan di sekolah. Pengenalan politik di keluarga dapat memberikan sikap dan karakter seseorang dalam menilai politik terhadap etika dan budi pekerti yang didapatkan. Muatan isi atau materi pengenalan politik yang biasanya diberikan dalam keluarga adalah penjelasan dan gambaran secara umum tentang partai yaitu lambang partai, sejarah partai dan tokoh-tokoh politik. Mekanisme atau cara memberikan pengenalan politik tersebut adalah mengajak keluarga terlebih kepada anak-anak untuk menonton berita di televisi yang didampingi oleh ayah

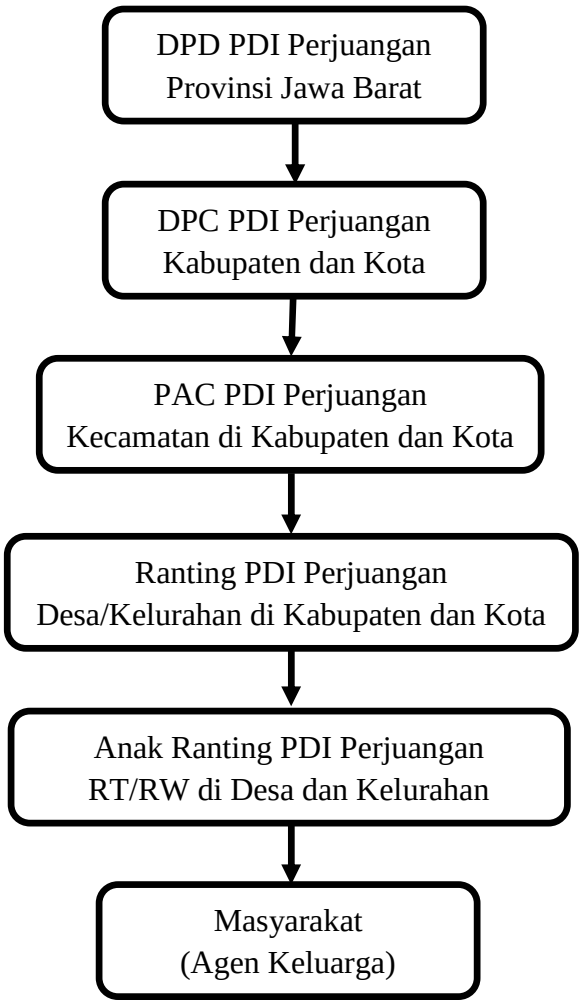
atau ibu dan orang tua lainnya atau tidak jarang orang tua membawa anak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengenalkan partai politik yang tertera di papan informasi. Pengenalan politik di keluarga terbatas pada sarana dan prasarana yang ada.

Masyarakat sebagai agen keluarga saat ini perlu suatu media atau alat dalam pengenalan politik yang dapat menarik perhatian anggota keluarga khususnya anak-anak dan remaja sebagai pemilih pemula. Pengenalan politik pada keluarga ini sebaiknya didukung penuh dan menjadi fokus perhatian partai politik khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat misalnya membuat dan membagikan buku pedoman tentang politik atau PDI Perjuangan itu sendiri di lingkungan Provinsi Jawa Barat mengenai sejarah partai, lambang partai, visi dan misi partai, tokoh-tokoh politik partai dan lain sebagainya yang dikemas dengan kajian dan sajian yang menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Terlebih saat ini adanya *games-net* "JOKOWI" yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pengenalan dini kepada masyarakat perihal sosialisasi politik di Provinsi Jawa Barat.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hubungannya terhadap agen keluarga terlihat pada koordinasi yang dilakukan oleh DPD kepada DPC, PAC, ranting dan anak ranting dalam pemberian sosialisasi politik kepada masyarakat secara langsung. Garis komando organisasi dan hierarki kepengurusan menjadi acuan penting dalam hal ketercapaian dan keberhasilan sosialisasi politik kepada

masyarakat. Berikut peneliti gambarkan bagan alur hubungan antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terhadap agen keluarga.

Bagan 4.1
Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Agen Keluarga



Bagan diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar di atas hubungan antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terhadap agen keluarga dalam hal sosialisasi politik sangat ditentukan oleh keberhasilan struktural organisasi partai yang tingkatannya paling dekat dengan masyarakat yaitu ranting dan anak ranting partai di bawah pimpinan PAC

dan DPC. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai pembuat dan penetapan kebijakan partai di daerah provinsi, maka DPC sampai tingkat anak ranting adalah pelaksana tugas dari hasil penetapan tersebut. Sosialisasi yang diberikan berupa pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat.

DPC PDI Perjuangan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Sukabumi dapat diketahui hubungan DPD kepada DPC secara umum baik, seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Rapat Kerja Cabang III DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi
Dibuka Oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi

Gambar 4.2
Rapat Kerja Daerah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang
Dihadiri Oleh Sekertaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hubungannya terhadap DPC, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi fokus kajian terlebih dalam menetapkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan khususnya dalam hal sosialisasi politik kepada masyarakat yaitu mengefektifkan dan mengefisienkan program kerja yang disesuaikan dari segi tatanan bahasa, muatan isi materi dan pola sosialisasi politik ke daerah-daerah kabupaten atau kota. Komunikasi internal partai antara DPD ke DPC secara intensif sangat dibutuhkan dalam hal komunikasi politik pada hierarki organisasi partai, dimana DPD memberikan arahan atau instruksi kepada DPC dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Begitupun terhadap DPC kepada PAC dan seterusnya sampai tingkat anak ranting secara umum hubungannya baik, namun hanya terbatas pada masalah komunikasi dan koordinasi.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen keluarga dapat dikatakan sangat penting, mengingat peran dan fungsi politik pertama ada di lingkungan keluarga. Sikap politik yang dimiliki masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai agen keluarga menekankan pada pendidikan karakter dan budi pekerti dari pemahaman nilai-nilai politik dan ideologis yang dimiliki masyarakat. Pendidikan karakter dan budi pekerti diarahkan pada akar budaya dan tradisi bangsa, nilai-nilai politik dan ideologis melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila, sedangkan isi sosialisasi politik yang diberikan oleh agen keluarga kepada anggota keluarga yaitu berupa penjelasan dan gambaran secara umum yang muatannya berisi pengenalan lambang dan sejarah partai serta tokoh-tokoh politik yang ada.

4.1.2 Kelompok Pendidikan Sebagai Agen Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen kelompok pendidikan merupakan agen sosialisasi yang berada pada sistem pendidikan formal misalnya akademisi baik perguruan tinggi maupun sekolah pendidikan tinggi lainnya di Provinsi Jawa Barat. Agen kelompok pendidikan dalam hal sosialisasi politik tentunya sangat diperlukan. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik dan agen kelompok pendidikan berbeda. Partai politik melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat umum yaitu menyampaikan gagasan-gagasan ideologi politik, sedangkan agen kelompok pendidikan menyampaikan sosialisasi politik untuk tujuan pendidikan yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pendidikan dan budaya politik. Kelompok pendidikan akan mengarah untuk mempengaruhi perilaku seseorang dengan bentuk motivasi dan dan keberhasilan dalam pendidikan politik secara ilmiah dengan keadaan yang faktual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Besar Universitas Padjajaran dan Pimpinan Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sebagian besar baru sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD) yaitu sekitar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah penduduk masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat yang sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penduduk masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat pekerja baik yang sudah tamat SMA, SMP, SD sekitar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penduduk masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat yang aktif

dibidang praktis sekitar 2% dari jumlah penduduk masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat kelas menegah atas sekitar 8% (delapan perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) tersisa menyebar ke berbagai hal.

Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Barat adalah tamatan kelas 2 SD, tetapi yang perlu menjadi fokus permasalahan yaitu bahwa masyarakat dengan pendidikan yang kelas 2 SD, maka mereka sangat sulit menyerap sosialisasi politik dari manapun khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Minimnya pendidikan dan pengetahuan politik yang mereka dapatkan tentu akan berpengaruh terhadap jalannya sosialisasi politik tersebut, sehingga dikhawatirkan sosialisasi politik yang mengarah pada masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi politik dengan cara dimobilisasi. Budaya politik masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan egaliter, budaya panutan, budaya bapak atau dikenal dengan istilah budaya paternalis. Masyarakat Provinsi Jawa Barat hanya melihat orang-orang yang lebih tinggi dan mempunyai jabatan, sehingga mereka tidak ada rasa termotivasi dan terinspirasi untuk sesuatu hal. Umumnya masyarakat Provinsi Jawa Barat merupakan pengikut saja, mengimitasi dan meniru orang lain terutama para pejabat-pejabat dan elit politik yang ada.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik seharusnya dimulai dari anak-anak terlebih dahulu sebelum kepada orang-orang dewasa, disanalah pelaksana sosialisasi politik mulai untuk mewarnai kepada pemikiran-pemikiran atas gagasan ideologi dan visi arah tujuan partai politik sebagai pilar kepada anak-anak tersebut akan tetapi dengan konteks yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang mudah untuk dipahami. Sosialisasi politik yang dilakukan

kepada anak-anak sebagai antisipasi pada tahap selanjutnya sebagai pengetahuan ketika beranjak remaja. Di Provinsi Jawa Barat tingkatan kategori masyarakat yang sudah remaja itu bukan lagi dalam bentuk sosialisasi politik akan tetapi bentuk transaksional politik, sehingga tidak adanya rasa memiliki. Sosialisasi tadi merujuk kepada rasa memiliki, anak-anak kecil yang dipupuk mengenai pengetahuan-pengetahuan politik sejak dini semakin besar, maka semangatnya kemudian ada dimereka. Tetapi berbeda dengan orang yang sudah lebih tua dan lebih memahami sosialisasi politik yang dilakukan akan dianggap percuma, karena masyarakat tersebut akan lebih tahu gagasan-gagasan politik dan transaksional politik yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, kelompok pendidikan sebagai agen sosialisasi politik sangat diperlukan mengingat sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat sampai saat ini masih terbatas oleh waktu dan kepentingan politik tertentu saja, sehingga gagasan-gagasan politik yang seharusnya tersampaikan secara penuh kepada masyarakat menjadi terhambat. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat suasana pemilihan umum saja selama lima tahun sekali misalnya pada saat pilkada kabupaten atau kota, pilgub dan pileg DPRD kabupaten atau kota, DPRD provinsi dan DPR RI. Sosialisasi politik kepada masyarakat harus dilaksanakan secara *continue* dan perlu untuk mematangkan pemahaman dan pengetahuan tentang ideologi politik yang diberikan dengan berbagai cara. Agen kelompok pendidikan dalam memberikan

sosialisasi politik berupa pendidikan politik yaitu melalui seminar, kuliah umum dan diskusi-diskusi politik lainnya yang diadakan secara terbuka bagi masyarakat seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
Seminar Pilgub Jabar 2013 di Unikom
Dihadiri oleh Tokoh Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dokumen Pribadi Seminar Pilgub Jabar 2013 di Unikom

Agen kelompok pendidikan sangat menentukan sikap dan kualitas pendidikan politik masyarakat secara akademisi dan umum lainnya. Institusi perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat sangat membantu dalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat umum terlebih sering diadakannya seminar politik, debat politik, kuliah umum dan lain sebagainya yang mengundang tokoh-tokoh dari partai politik, pengamat politik dan pakar politik. Kader DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagian besar adalah akademisi yang terjun dalam politik. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hubungannya dengan kelompok pendidikan memiliki keterkaitan erat, terlebih dalam internal partai adanya jabatan fungsional pendidikan, kebudayaan dan keagamaan PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas agen kelompok pendidikan dalam sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sangat penting. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh kelompok pendidikan yaitu mensosialisasikan gagasan-gagasan pendidikan tentang gejala dan fenomena politik yang sedang terjadi kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Gagasan-gagasan pendidikan tentang politik yang diberikan berada pada aturan dan kurikulum pendidikan yang ada sesuai dengan kemampuan dan respon masyarakat. Kelompok pendidikan menilai saat ini sosialisasi politik yang dilakukan oleh seluruh partai politik di Provinsi Jawa Barat relatif tidak berjalan. Beberapa partai yang lain berjalan, namun tidak mengenai sasaran kepada masyarakat. Salah satunya yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat walaupun sudah melakukan sosialisasi politik. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat lebih mensosialisasikannya itu bukan kepada masyarakat tetapi kepada anggota internal dan kader-kader partai itu sendiri yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan sosialisasi politik kembali karena sudah memiliki haluan atau arah ideologis partai tersebut.

Kelompok pendidikan dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat umumnya tidak memiliki hubungan khusus, namun dalam kegiatan-kegiatan dan acara kedewanan itu ada misalnya memberikan penjelasan mengenai penerapan dan pelaksanaan *Electronic Government* (*E-Gov*), kemudian kegiatan sosial dengan memberikan gagasan Gerakan Ambil Sampah (GAS) dimana seluruh masyarakat ikut berpartisipasi, Seminar Pilgub Jabar dengan mengundang calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ada dengan menyampaikan visi, misi dan

strategi dalam mewujudkan fungsi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dimulai dari sistem birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan.

4.1.3 Media Massa Sebagai Agen Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen media massa dengan berbagai bentuk dan kajian penyampaiannya merupakan salah satu agen yang dapat mempengaruhi dan memberikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat secara umum. Media massa sebagai komunikator yang cepat dan meluas menjadi daya tarik masyarakat dalam memberikan sosialisasi politik di Provinsi Jawa Barat baik elektronik berupa televisi dan radio, media cetak berupa koran, majalah dan surat kabar lainnya serta media teknologi seperti *internet*. Agen media massa pada sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat masih sangat diperlukan terlebih masyarakat yang sibuk akan kepentingan dan pekerjaannya masing-masing menjadi kendala ketika sosialisasi politik dilakukan secara langsung. Media massa sebagai sarana komunikasi politik yang cepat dan meluas menjadikan sorotan utama masyarakat di Provinsi Jawa Barat dalam mengetahui dan mengamati perkembangan politik yang ada. Media massa dalam menyampaikan sosialisasi politik hendaknya bersifat netral tidak berpihak kesebelah pihak, tentunya disinilah peran media massa sebagai agen sosialisasi politik yang sesungguhnya, apakah menyampaikan sosialisasi politik yang berorientasi pada pendidikan politik atau pengadaan dan pengalihan isu politik yang berkembang di masyarakat.

Media massa memiliki wewenang politik tertentu dalam hal mengkomunikasikan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan gambaran, pengetahuan, suasana dan kondisi politik yang terjadi. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan media massa memiliki hubungan yang sangat erat, terlebih ketika kampanye berlangsung baik pada pilpres, pileg pusat dan daerah, pilkada provinsi, kabupaten atau kota. Calon kandidat biasanya meminta ijin kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat setelah adanya instruksi dari KPUD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat umum. Visi dan misi yang disampaikan biasanya berupa program kerja dan arahan untuk memilih calon kandidat pada saat pemilihan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Marketing Communication* KompasTV Jawa Barat dapat diketahui bahwa agen media massa dalam hal sosialisasi politik tentunya sangat penting dan diperlukan. Terkait sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, KompasTV merupakan sarana media massa yang independen, dimana tidak berkepihakan pada partai politik manapun. KompasTV sebagai *mass media* memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat berupa pendidikan politik dari berbagai partai politik yang ada, sehingga tidak hanya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat saja tetapi semua partai politik yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan esensi dari *values* atau nilai-nilai dan kaidah penyiaran layak atau tidak untuk disiarkan dan edukatif atau tidak dan berdampak

positif atau tidak terhadap psikologis masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Secara umum media massa tidak memiliki hubungan khusus dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, namun secara pribadi dari kader PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sempat ada yang mendatangi media massa misalnya KompasTV hanya sekedar untuk promo dan memasang iklan politik pada saat Pilgub Jabar 2013 pada saat itu Ibu Rieke Diah Pitaloka, kemudian pada saat Pilwalkot Kota Bandung Bapak Ayi Vivananda yang tentu KompasTV tidak sembarangan menerima iklan tersebut, melihat terlebih dahulu muatan isi dan esensi apa yang disampaikan yang *notabene* tidak menyudutkan salah satu pihak dan SARA. Secara umum media massa hanya sebagai fasilisator di lapangan secara *accidental* atau kebetulan yang menyampaikan dengan siaran media telekomunikasi televisi secara edukatif dan sehat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, media massa khususnya stasiun televisi memiliki peranan yang besar dalam hal sosialisasi politik kepada masyarakat. Masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagian besar memahami dan mengetahui peristiwa dan fenomena politik yang terjadi dari media massa khususnya televisi. Berkenaan dengan sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat pada media stasiun televisi yang masyarakat rasakan saat ini adalah sangat penting. Stasiun televisi banyak menayangkan pemberitaan dalam skala nasional sedangkan kedaerahan hampir dapat dikatakan minim, sehingga pengetahuan dan sosialisasi politik di daerah itu kecil sekali khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Di Provinsi Jawa Barat media massa dapat dikatakan penggabungan proses kepentingan dalam hal politik, dimana pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Media massa sebagai perantara yang besar yang menghubungkan gagasan-gagasan politik dengan lembaga pemerintah yang resmi yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Secara umum media massa yang terjadi saat ini terdapat gejala bahwa pelaksana fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja akan menghasilkan informasi yang berat sebelah dan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Hal tersebut tentunya akan menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat dimasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen media massa dapat dikatakan sangat penting, sehingga diperlukan kerjasama yang dilakukan antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan media massa yang ada di Provinsi Jawa Barat. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat lebih memfokuskan terhadap skala nasional daripada kedaerahan, sehingga masyarakat Provinsi Jawa Barat mengenai pemahaman nilai-nilai politik dan tokoh-tokoh politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat minim dan sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Barat hampir tidak mengetahui. Pada dasarnya media massa dan partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah. Hal tersebut dimaksudkan bahwa partai politik berperan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, sedangkan media massa sebagai

jembatan yang sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

4.1.4 Kelompok Kerja Sebagai Agen Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen kelompok kerja yang melakukan pekerjaan sejenis secara pribadi dan menyeluruh pada masyarakat dengan pekerjaan tertentu dalam sosialisasi politik. Agen kelompok kerja pada sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menekankan pada simpatisan masyarakat PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kelompok kerja yang dimaksud, dimana masyarakat bekerja dan terjadi interaksi sosial, sehingga timbulnya suatu arahan atau sosialisasi politik masyarakat melalui kelompok kerja tersebut. Simpatisan masyarakat PDI Perjuangan tersebut diberikan arahan terlebih dahulu mengenai muatan materi sosialisasi politik berupa pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok kerja seperti swasta dan buruh di wilayah kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat dapat diketahui bahwa agen kelompok kerja merupakan salah satu agen yang dapat mempengaruhi berjalannya sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik. Agen kelompok kerja tersebut sebagian orang merupakan salah satu simpatisan partai politik, dimana salah satunya partai tersebut yaitu PDI Perjuangan. Agen kelompok kerja ini memberikan sosialisasi politik kepada rekan kerja mereka lainnya dengan memberikan pemahaman-pemahaman ideologis partai yang

sebelumnya mereka dapatkan pada sosialisasi yang disampaikan oleh partai. Pemahaman ideologis partai yang disosialisasikan hanya pada tataran umum partai saja seperti gotong royong, kebersamaan dan kerakyatan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, pemahaman ideologis kelompok kerja swasta dan buruh wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat sebagian besar tidak memahami esensi dari nilai-nilai yang dimiliki PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Sebagian besar diantaranya simpatisan hanya memperjuangkan dalam pemenangan partai. Sosialisasi politik yang biasanya dilakukan oleh kelompok kerja yaitu dalam bentuk cakapan-cakapan atau obrolan dan diskusi berupa pengarahan rekanan kerja lainnya untuk ikut serta dalam pemilihan partai politik tersebut. Agen kelompok kerja ini sesungguhnya jika diarahkan, mampu memiliki pengaruh yang dominan kedua setelah keluarga dalam melakukan sosialisasi politik karena mengikat pada rekanan dan pertemanan kerja sehari-hari. Kelompok kerja di Provinsi Jawa Barat berkembang dengan lebih luas karena terjadi menjadi satu dengan kelompok-kelompok lainnya. Perkembangan lebih luas itu antara lain disebabkan karena bertambah luas ruang lingkup lingkungan yang ada misalnya keluarga yang ada dalam kelompok kerja, kelompok agama, kelompok pendidikan dan lain sebagainya. Kelompok kerja sangat luas, sehingga sehingga di Provinsi Jawa Barat dalam hal sosialisasi politik secara ideal mempunyai peranan yang positif dalam membangkitkan motivasi dan keberhasilan dalam pendidikan politik di masyarakat.

Kelompok kerja di Provinsi Jawa Barat dapat dinilai dari dua sisi peranannya berdasarkan pengamatan dilapangan. *Pertama*, peranan positif kelompok kerja dalam hal sosialisasi politik pada pendidikan politik masyarakat Provinsi Jawa Barat yaitu dapat menimbulkan rasa aman dan rasa dianggap penting berasal dari suatu kelompok kerja tersebut. Kelompok kerja dapat menyalurkan rasa kecewanya, rasa takut, rasa khawatir, rasa gembira dan lain sebagainya dengan mendapatkan tanggapan yang wajar dari rekan-rekannya. Kelompok kerja dapat memungkinkan mengembangkan kemampuan dalam keterampilan sosial khususnya komunikasi, sehingga masyarakat lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Kelompok kerja mempunyai pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu yang mendorong masyarakat untuk bersifat dewasa. Kelompok kerja akan menimbulkan suatu kemandirian pada masyarakat dalam hal berpolitik, sehingga ideologi an pemahaman politik tersebut tidak tergantung pada siapa pun. *Kedua*, peranan negatif kelompok kerja dalam hal sosialisasi politik pada pendidikan politik masyarakat Provinsi Jawa Barat yaitu mendorong siapa pun didalam untuk bersifat diskriminatif kepada masyarakat diluar kelompok kerja tersebut, sehingga memungkinkan timbulnya sikap yang kurang adil di masyarakat. Kelompok kerja mendorong terjadinya individualisme karena rasa kepatuhan hanya dikembangkan secara pribadi. Kelompok kerja kadang-kadang timbul pertentangan dengan orang tua, saudara atau kerabat. Kelompok kerja suatu kelompok yang tertutup sulit untuk ditembus, sehingga penilaian terhadap sikap dan tindakan kelompok kerja tersebut sukar dilakukan oleh pihak luar. Kelompok kerja mendorong masyarakat untuk menyerasikan diri dengan pola

kehidupan yang sama latar belakangnya, sehingga sulit untuk mengadakan penyesuaian dengan pihak-pihak yang berbeda latar belakangnya.

Kelompok kerja perlu untuk mempertimbangkan secara fokus dalam hal mensosialisasikan politik dilingkungannya terhadap masyarakat, sehingga harus diberikan pemahaman politik yang mendalam agar tidak memberikan arah doktrinasi politik yang negatif. Kelompok kerja yang menghasilkan hal-hal positif hendaknya dilakukan pembinaan. Hal tersebut bukanlah peran kelompok kerja dalam sosialisasi politik dapat menggantikan partai politik, tetapi kontak dan komunikasi politik yang harus tetap dipelihara dan dikembangkan. Peranan kelompok kerja terhadap masyarakat tidak dapat digantikan secara utuh oleh pihak-pihak lain, sehingga kelompok kerja diperlukan suatu proses penyesuaian yang sangat mendalam khususnya oleh partai politik salah satunya adalah oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen kelompok kerja dapat dikatakan sangat penting, walaupun saat ini esensi atau isi dari ideologi dan nilai-nilai politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan belum mampu tersampaikan secara penuh kepada masyarakat. Proses penyampaian sosialisasi politik terhadap rekanan kerja dalam kelompok kerja tersebut dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang dapat diterima oleh masyarakat. Disisi lain pengefektifan dan efisiensi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tersebut dapat terwujud, selain dapat hemat biaya anggaran partai juga dapat hemat waktu. Sebagaimana diketahui sebagian kelompok kerja tersebut memiliki waktu yang

padat untuk bekerja dalam ikatan kontrak, dimana pergi kerja pagi hari dan pulang kerja petang hari. Hal tersebut menyebabkan anggota partai maupun kader partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk bekerja ekstra, sehingga sangat diperlukan kelompok kerja tersebut dalam memberikan sosialisasi politik kepada rekanan kerja lainnya.

4.1.5 Kelompok Agama Sebagai Agen Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen kelompok agama yang tumbuh berdasarkan rasa solidaritas misalnya para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya dalam memberikan sosialisasi politik. Agen kelompok agama pada sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sangat penting terutama dalam memberikan nilai-nilai dan keteladanan religius kepada masyarakat. Provinsi Jawa Barat sebagian besar masyarakat mayoritas beragama muslim dengan demikian banyak pula kedekatan antara masyarakat dengan tokoh pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan agen kelompok agama banyak menjalin kerjasama diantaranya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memiliki sayap partai yaitu Baitul Muslimin Indonesia. Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bergabung dalam Baitul Muslimin Indonesia, dimana dalam sayap partai tersebut sosialisasi politik dapat tersampaikan dengan baik dan bernuansa religius, sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Humas Pondok Pesantren Darul Ma`Arif dapat diketahui bahwa agen kelompok agama dalam hal sosialisasi politik perlu dibatasi. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh kelompok agama akan berbeda dengan sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik. Di Provinsi Jawa Barat saat ini sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik telah menunjukkan ekstremnya misalnya dengan melakukan politik uang, kampanye hitam, pembelian suara dan lain sebagainya telah menunjukkan sikap *A Moral* kepada masyarakat dalam pelaksanaan politik di Provinsi Jawa Barat. Ditinjau dari sudut pandang agama sekitar 80% (delapan puluh perseratus) masyarakat Provinsi Jawa Barat mengalami kemunduran moral, budi pekerti dan karakter. Posisi kelompok agama hanya sebatas mengarahkan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengarahkan sikap toleransi untuk menghargai orang lain. Khususnya dalam hal sosialisasi politik kelompok agama hanya menekankan masyarakat untuk menentukan dan memilih pemimpin atau para wakil rakyat yang bersikap adil, jujur, amanah, peduli dan berorientasi kepada kepentingan hajat hidup mayarakat dan negara.

Kelompok agama di Provinsi Jawa Barat saat ini, jika dilihat dari suasana dan kondisi yang ada para pemuka agama seperti ulama, kiai, ustadz, pendeta, bikhsu dan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh di Provinsi Jawa Barat dalam hal sosialisasi politik bisa dikatakan sangat minim. Hal tersebut dikarenakan sikap dan tindakan politik tidak dapat mensegmentasikan agama, terkecuali untuk mempersatukan dan menasionalismekan diri dengan memberikan contoh pengetahuan-pengetahuan perjuangan pemimpin besar agama seperti para khalifah

dan pejuang-pejuang agama di Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi politik yang dilakukan kelompok agama kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat melalui berbagai macam pengajian dan tausiyah misalnya di pesantren-pesantren atas usulan partai politik. Kegiatan tersebut biasanya ramai ketika menjelang pemilihan-pemilihan umum berlangsung, dimana calon-calon legislatif DPR maupun DPRD, eksekutif baik calon gubernur, bupati maupun walikota bahkan calon presiden pun mendatangi kelompok agama tersebut untuk mensosialisasikan politik dan gagasan-gagasan partai politik yang ada. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tidak terlalu fokus terhadap sosialisasi politik melalui agen kelompok agama tersebut walaupun bersifat penting. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengembalikan kembali kepada calon-calon kader yang akan duduk di pemerintahan perihal sosialisasi politik melalui agen kelompok agama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen kelompok agama dapat dikatakan sangat penting dan saat ini sangat diperlukan untuk memobilisasi masyarakat dalam berpartisipasi politik. Melihat penduduk Provinsi Jawa Barat sebagian besar mayoritas beragama muslim hendaknya hubungan secara *continue* terhadap kelompok agama harus terjalin. Jika DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya menekankan pada sayap partai atau kelompok komunitas kepentingan agama tertentu saja, maka sosialisasi politik ini tidak akan mengenai sasaran kepada masyarakat, terlebih kelompok agama menyampaikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh

partai politik khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat belum bekerja secara maksimal dalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat.

4.1.6 Kelompok Kepentingan Sebagai Agen Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Agen kelompok kepentingan berupa ikatan komunitas kelompok baik berasosiasi maupun kelompok nonasosiasi seperti paguyuban maupun organisasi masyarakat lainnya dalam memberikan sosialisasi politik. Kelompok kepentingan tidak terlalu dominan dan diprioritaskan dalam sosialisasi politik khususnya sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Kelompok kepentingan seperti asosiasi maupun paguyuban dalam sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat lebih bersifat simpatisan dan suka rela tanpa adanya imbalan atau *feedback* walaupun kader atau anggota internal partai DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat ada yang tergabung dalam asosiasi maupun paguyuban dan ormas tertentu. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tidak secara langsung atau tidak secara hierarki organisasi memiliki hubungan dengan kelompok kepentingan baik asosiasi, paguyuban dan ormas tertentu.

Kelompok kepentingan di Provinsi Jawa Barat sangat beragam dapat dilihat dari bidang dan kompetensinya masing-masing. Salah satunya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama dan spesifikasi yang berbeda-beda sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Provinsi Jawa Barat. Kelompok kepentingan seperti LSM memiliki peranan vital dalam hal sosialisasi

politik di masyarakat, jika diklasifikasikan di Provinsi Jawa Barat ada beberapa pandangan LSM yang ada dengan paradigma yang berbeda yaitu *pertama*, pandangan kesejahteraan melihat bahwa sebab-bebab kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat adalah kekuatan yang berada diluar kendali manusia, seperti nasib dan takdir. Kelompok ini cenderung toleran bahkan berusaha membantu pemerintah, menghindari konflik dan pandangan politik, misalnya seperti Komunitas Rumah Sahaja Bandung. *Kedua*, pandangan modernisasi, dimana keterbelakangan termasuk kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya pendidikan, penghasilan, keterampilan, dan kesehatan. Pandangan politiknya cenderung menghindari konflik, melakukan perubahan secara fungsional dan mendukung pemerintahan misalnya Bina Swadaya Jawa Barat. *Ketiga*, pandangan reformasi, dimana keyakinan bahwa sumber dari masalah-masalah sosial adalah lemahnya pendidikan, korupsi, *mismanagement* dan *inefisiensi*, sehingga memilih aktifitas berupa memperbanyak tenaga profesional dan pemberlakuan sanksi yang berat terhadap pelanggar hukum. Perubahan sosial cenderung menghindari konflik dengan pandangan politik liberal yang mengarah kepada reformasi yang bertujuan menata kembali dan merampingkan pemerintahan misalnya yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat. *Keempat*, pandangan liberalisasi atau pembebasan, dimana penyebab segala keterbelakangan termasuk kemiskinan adalah penindasan, pengisapan atau eksploitasi dan pembodohan rakyat. Bentuk kegiatan yang dilakukan biasanya berupa pendidikan politik populer, pencetakan kader gerakan, mobilisasi aksi ataupun kampanye pembentukan opini publik misalnya seperti LP3ES Jawa Barat. *Kelima*, pandangan transformasi, dimana

sumber keterbelakangan dan kemiskinan adalah ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi dan politik. Kegiatan-kegiatannya biasanya dilakukan dengan melalui penyadaran politik, pengorganisasian masyarakat, mobilisasi aksi dan membenagun jaringan advokasi misalnya YLBHI Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Jawa Barat dapat diketahui bahwa agen asosiasi seperti AIPI hubungannya dengan partai politik khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam hal sosialisasi politik tidak ada, namun evaluasi kritis pergejolakan politik dan dinamika pemerintahan yang terjadi akan selalu dikaji dan dibahas. AIPI sebagai asosiasi ilmu yang mengakaji tentang perpolitikan di Indonesia dapat mensosialisasikan hanya sebatas kerja tugas, pokok dan fungsi AIPI dalam tataran keilmuan dan penalaran pendidikan, bukan tentang pemahaman ideologi seperti yang dilakukan oleh partai politik atau DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, asosiasi seperti AIPI memiliki peranan yang besar dalam menentukan arah dinamika perpolitikan dan pemerintahan yang terjadi. Pimpinan dan anggota AIPI merupakan ahli-ahli, pakar-pakar dan guru besar politik dan pemerintahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan politik. Partai politik khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebaiknya menjalin hubungan terhadap AIPI dengan melakukan forum diskusi dan seminar regional dan nasional tentang evaluasi kritis pergejolakan politik dan dinamika pemerintahan yang ada, sehingga saling tukar pikiran dan merumuskan strategi politik yang tepat untuk

diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dimulai dari kebijakan atau aturan internal partai dan sosialisasi politik khususnya kepada masyarakat mengenai pendidikan politik serta budaya politik yang tepat di Provinsi Jawa Barat, dimana masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat menerima dan memahami tujuan dan kajian sosialisasi politik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Humas dan Administratif Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Paguyuban Bandung dapat diketahui bahwa agen paguyuban seperti KPSI hubungannya dengan partai politik khususnya dalam hal sosialisasi politik tidak ada. KPSI bergerak dibidang sosial dan peduli psikologis masyarakat, sehingga jika adanya kerjasama dan hubungan antara partai politik dan KPSI setidaknya mampu untuk membantu sosialisasi politik kepada masyarakat yang baik dan sehat.

Kelompok kepentingan baik asosiasi, paguyuban maupun organisasi masyarakat lainnya sebenarnya mereka memiliki peranan yang baik dalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat. Paguyuban dan ormas disebagian komunitas lebih memilih netral atau tidak berkepihakan kepada partai politik manapun dan ini menjadi satu kendala dalam hal sosialisasi politik melalui agen kelompok kepentingan. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebaiknya menjalin kerjasama dengan kelompok kepentingan tersebut. Tentunya dengan memiliki aturan atau batasan khusus misalnya kesesuaian proporsi sosialisasi politik yang diberikan dengan kapasitas dan tupoksi dari kelompok kepentingan tersebut. Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen kelompok kepentingan baik berupa ikatan

komunitas asosiasi maupun kelompok nonasosiasi seperti paguyuban maupun organisasi masyarakat lainnya dalam memberikan sosialisasi politik dapat dikatakan sanagat diperlukan. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hubungannya terhadap komunitas maupun paguyuban yang ada hanya bersifat simpatisan dan suka rela tanpa adanya imbalan atau *feedback*.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis uraian di atas, sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen-agen sosialisasi lainnya sangat penting dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Tetapi jika dilihat dari peranan agen sosialisasi yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff tingkat partisipasi politik masyarakat akan meningkat, apabila agen sosialisasi tersebut berjalan dan berhubungan dengan agen sosialisasi pelaku utamanya, sehingga sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui agen-agen sosialisasi lainnya perlu untuk ditingkatkan, dikarenakan saat ini minimnya hubungan dan kerjasama antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan agen-agen sosialisasi tersebut. Tetapi jika peranan dan hubungan antara hierarki organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan DPC kabupaten atau kota dapat bersinergis, fokus dan berjalan dengan baik, maka sebagai pelaku utama sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat akan mengenai dan tepat pada sasaran.

4.2 Materi Dalam Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Materi sosialisasi politik adalah muatan isi yang disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada anggota internal partai maupun masyarakat umum. Materi sosialisasi ini akan mengarah pada tingkat prestasi berkenaan dengan ketekunan, pencapaian atau perolehan, ganjaran-ganjaran material, mobilitas sosial pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Esensi materi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat secara umum bersifat faktual. Materi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat meliputi pengetahuan yang didalamnya memiliki nilai-nilai dan sikap politik. Pengetahuan yang disampaikan mendukung untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai suatu nilai khusus atau suatu sikap pada masyarakat, sehingga membentuk suatu kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang dapat memainkan peranan penting dalam berpartisipasi politik. Materi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sesuatu yang didapatkan dari sebuah pendidikan dan pengalaman politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat, dimana untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran memberi pengalaman kepada masyarakat tentang politik, maka sikap-sikap politik berupa nilai-nilai dan kepercayaan politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat menarik perhatian masyarakat. Sikap politik akan memunculkan pengalaman sebagai gambaran masyarakat untuk menilai baik atau buruk yang akan mempengaruhi terhadap informasi yang didapatkan.

4.2.1 Pengetahuan Yang Disampaikan Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan materi sosialisasi politik memiliki pengetahuan. Hal tersebut didapatkan dari sebuah pendidikan dan pengalaman DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, dimana materi sosialisasi politik yang diberikan memiliki batasan-batasan tertentu, dimana adanya pengetahuan politik yang diberikan kepada kader internal Partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat dan masyarakat umum. Pengetahuan yang disampaikan kepada kader internal Partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat memiliki jenjang atau tingkatan masing-masing melalui struktur partai dan sekolah kader.

Struktur partai merupakan tingkatan, hierarki, garis komando pimpinan dan kewenangan tupoksi masing-masing kader dalam internal Partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Struktural Partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat dimulai dari setiap jenjang DPD kepada DPC, DPC kepada PAC, PAC kepada ranting dan ranting kepada anak ranting. Sekolah kader adalah pendidikan politik yang diberikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada kader yang disesuaikan tingkatannya yaitu dimulai dari sekolah tingkat pratama (kecamatan), tingkat madya (kabupaten atau kota) dan tingkat nasional (provinsi), kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Sekolah kader yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat biasanya berlokasi khusus di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat selama tujuh hari secara *continue* seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.4
Pelatihan Monografi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Dihadiri Oleh Perwakilan DPC PDI Perjuangan Kabupaten dan Kota



Sumber : Dokumentasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menerapkan standar bahwa misalnya untuk menjadi Ketua DPC minimal harus menyelesaikan sekolah kader partai tingkat madya, kemudian Ketua PAC minimal harus menyelesaikan sekolah kader tingkat pratama, dimana para kader akan diberikan sosialisasi atau pendidikan politik yang diformulasikan sesuai dengan tingkatannya. Pendidikan politik yang diberikan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada kader internal partai adalah menyampaikan *Dasa Prasetya* atau arah umum program partai sebagai doktrin perjuangan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota partai sesuai dengan visi dan misi partai yang berpedoman dalam penghayatan Pancasila.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memberikan materi sosialisasi politik berkenaan dengan pengetahuan yang disampaikan langsung kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat melalui DPC ditingkat kabupaten dan kota serta PAC ditingkat kecamatan pada sekolah kader. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengarahkan agar masyarakat diberikan pendidikan politik berupa

pemahaman dan penghayatan tentang menegakkan empat pilar kebangsaan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, kemudian memperkokoh budaya gotong royong dalam masyarakat, membentuk dan membangun karakter bangsa pada mayarakat melalui penghayatan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara sebagai tujuan akhir mendidik dan mencerdaskan masyarakat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, materi sosialisasi politik berkenaan dengan pengetahuan didapatkan dari kebijakan dan putusan hasil musyawarah DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Pengetahuan didapatkan dari pengalaman tokoh-tokoh politik PDI Perjuangan baik ditingkat kabupaten atau kota maupun ditingkat Provinsi Jawa Barat, kemudian pengetahuan didapatkan dari pendidikan politik yang diberikan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yaitu sekolah kader dimulai dari sekolah tingkat pratama, tingkat madya dan nasional.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung memberikan materi sosialisasi politik kepada masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Bandung berkenaan dengan pengetahuan yaitu berupa pengarahan yang diberikan oleh DPD

PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung dengan mengerahkan kader atau anggota partai mulai dari tingkat bawah yaitu anak ranting sampai tingkat PAC untuk dapat menyusun program dan melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung, kemudian DPC akan melakukan rapat internal untuk pembahasan program dan sosialisasi politik lainnya kepada masyarakat yang sebelumnya akan dilakukan filterisasi atas persetujuan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat maupun DPP PDI Perjuangan pada saat kongres partai berlangsung yaitu selama lima tahun sekali. Pengetahuan yang dimiliki DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung tidak hanya pemahaman ideologi partai dan program sosialisasi partai, akan tetapi juga melihat kondisi dan suasana kemasyarakatan khususnya dibidang sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat yang berada di Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa saat ini sosialisasi politik yang disampaikan oleh partai politik khususnya PDI Perjuangan sangat penting dalam hal pengetahuan politik. Sosialisasi politik tersampaikan hanya pada media massa saja seperti koran dan televisi itupun hanya sebuah iklan ajakan atau seruan untuk memilih partai tersebut. Sosialisasi politik yang dilakukan partai politik khususnya PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Bandung ini secara langsung tidak ada undangan kepada masyarakat misalnya seperti waktu kampanye pileg bulan april lalu ke daerah-daerah seperti di Kecamatan Katapang, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin hampir tidak ada padahal itu adalah tempat-tempat strategis, jadi hampir seluruh partai politik hanya mengerahkan simpatisan dan kader partai politiknya tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, dapat dirasakan secara langsung suasana dan tempat lokasi pemberian sosialisasi politik, jika di Kabupaten Bandung masyarakat dapat merasakan minimnya sosialisasi politik yang didapatkan, berbeda dengan kondisi atau suasana di Kabupaten Subang, dimana hampir disetiap penjuru Wilayah Kabupaten Subang didomisili oleh PDI Perjuangan, dimulai dari tingkat PAC sampai DPC semua aktif ikut serta dalam mengenalkan dan mensosialisasikan PDI Perjuangan, sehingga masyarakat memahami benar peran dan fungsi PDI Perjuangan terlebih ideologi dan gagasan PDI Perjuangan yang dikedepankan dimulai dari nilai-nilai dan sikap politik PDI Perjuangan. Kabupaten Subang dapat dilihat dari struktur pemerintahannya dimulai dari kepala daerah sampai ketua DPRD dipegang oleh kader PDI Perjuangan, sebenarnya disanalah peran, fungsi dan strategi partai dapat diperkenalkan secara luas kepada masyarakat, sehingga baik program maupun sosialisasi politik yang disampaikan dapat mengenai sasaran yaitu masyarakat.

DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi memberikan materi sosialisasi politik kepada masyarakat khususnya di lingkungan Kota Cimahi berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi yaitu melihat langsung apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat khususnya di Wilayah Kota Cimahi. DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi mengawal sosialisasi politik dari pelaksanaan program terlebih dahulu, kemudian pengarahan kepada penyampaian ideologi dan nilai-nilai politik partai yang diberikan kepada masyarakat. Mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh kader dan anggota DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi telah memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri.

DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi saat ini sedang melakukan pemfokusan program partai pada bidang kesehatan yaitu program pemberdayaan perempuan dan antisipasi ibu melahirkan, karena selama ini di Kota Cimahi angka ibu melahirkan kemudian meninggal tinggi. DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi dengan memiliki pengetahuan langsung melihat kondisi masyarakat yang ada mampu memberikan suatu layanan kepada masyarakat berupa sosialisasi program politik diantaranya yaitu memberitahu bagaimana cara merawat kehamilan, bagaimana cara merawat anak usia dini, maupun merawat setelah pasca melahirkan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, pemberian sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi kepada masyarakat terfokus pada program kerja yang dirumuskan oleh kader internal partai yang berada di DPRD Kota Cimahi. Pengetahuan anggota dan kader partai dilihat dari kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat Kota Cimahi menyampaikan program kerja dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Cimahi cukup baik khususnya di Wilayah Cimahi Selatan, namun minimnya pengarahan pengetahuan terhadap pemahaman-pemahaman politik dan kebangsaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat Kota Cimahi tidak terlalu tahu banyak tentang pengetahuan politik. Pengetahuan politik yang masyarakat pahami hanya terhadap pada berjalannya proses pelaksanaan politik dan pemerintahan di Fraksi PDI Perjuangan Kota Cimahi kepada masyarakat.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi memberikan materi sosialisasi politik kepada masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Sukabumi berkenaan dengan pengetahuan yaitu berupa pengarahan politik, pendalaman wawasan sejarah kebangsaan dan tujuan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diberikan secara langsung kepada masyarakat misalnya kepada masyarakat disekitaran Wilayah Cisaat, Jampang dan sekitaran Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pemberian sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi masyarakat merasakan kegiatan sosialisasi politik yang diberikan perihal pengetahuan politik selama ini hanya pada masa-masa kampanye tertentu saja seperti pemilihan legislatif, pilkada, pilgub dan pilpres. Kegiatan lainnya merupakan program partai yang berada pada fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi yang disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenai materi sosialisasi politik dalam hal pengetahuan yang dimiliki oleh kader atau anggota Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sangat penting. Pemahaman ideologi partai, visi, misi dan arah tujuan partai sudah melekat dan tertanam di seluruh kader atau anggota Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Materi sosialisasi politik dalam hal pengetahuan yang dimiliki oleh kader atau anggota Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebaiknya diberikan kepada masyarakat secara langsung bukan kepada kader dan simpatisan saja, karena bagaimana pun baik kader maupun simpatisan mereka jelas sudah paham mengenai ideologi dan arah tujuan partai tersebut, sedangkan

masyarakat secara umum mereka awam terhadap pengetahuan-pengetahuan politik yang ada seperti pada pembahasan di atas misalnya di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi sebagian besar masyarakat mereka tidak paham tentang kajian politik terlebih ideologi dan gagasan-gagasan partai politik khususnya PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan di Kabupaten Subang dan Kota Cimahi sebagai daerah yang didomisili oleh PDI Perjuangan, sehingga pelaksanaan sosialisasi baik oleh kader ataupun anggota dari partai maupun fraksi PDI Perjuangan di DPRD mereka dapat memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melaksanakan program serta agenda politik lainnya kepada masyarakat.

4.2.2 Nilai-nilai Yang Disampaikan Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan materi sosialisasi politik memiliki nilai-nilai politik. Hal tersebut dikarenakan adanya etika dan prilaku politik yang dimiliki oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran memberikan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan kepada masyarakat tentang politik. Nilai-nilai politik yang diberikan berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Nilai-nilai politik yang diberikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebelum ke masyarakat diberikan terlebih dahulu kepada kader internal Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Pancasila termaktub dalam sekolah kader tersebut diformulasikan dan disesuaikan dengan tingkatannya memuat nilai-nilai politik tentang kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Kader internal partai di kedepankan, karena mereka harus mampu memperkenalkan kepada masyarakat luas. Kader sebagai ujung tombak partai yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan nilai-nilai politik yang disesuaikan dengan visi dan misi program partai yang diperjuangkan, dimana mereka harus menguasai dan memahami nilai-nilai politik tersebut yang telah termaktub dalam kurikulum atau formulasi yang berikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam sekolah kader.

Formulasi nilai-nilai politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat adalah terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur dengan tradisi yang menjadi fokus utama adalah gotong royong sebagai perjuangan partai. Nilai-nilai politik lainnya adalah membentuk dan membangun karakter masyarakat dalam bangsa dan bernegara, mendidik dan mencerdaskan masyarakat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan, mempertahankan dan menyebar luaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Sukabumi, materi sosialisasi politik berkenaan dengan nilai-nilai politik yang biasanya diberikan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman dan penjelasan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyampaian pedoman penghayatan pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang telah mencakup keseluruhan, dimana dimulai dari pemahaman toleransi antar warga negara, sosial dan peri kemanusiaan, rasa persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat dan berkeadilan. DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat memberikan pemahaman tentang arah ideologi partai yang berpedoman kepada Pancasila 1 Juni 1945, dimana muatannya tentang kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, pemberian sosialisasi politik berkenaan tentang nilai-nilai politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat masih dirasakan minim. Nilai-nilai politik hanya tersampaikan pada kader, anggota dan simpatisan internal partai saja tidak secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat, sejauh ini nilai-nilai politik yang diberikan kepada masyarakat belum begitu jelas dan dipahami. Secara umum

masyarakat mengetahui nilai-nilai politik PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya sebatas sejarah masa lalu yang disampaikan oleh orang tua mereka. Jika sekarang PDI Perjuangn Provinsi Jawa Barat gencar dengan ideologi partai yang melaksanakan dan mengamalkan Pancasila 1 Juni 1945, Trisakti dan empat pilar kebangsaan, namun disebagian masyarakat masih minim tentang pengetahuan tersebut dan sebagian masyarakat lainnya hanya mengetahui paham ideologi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yaitu marhaenisme merupakan ajaran Ir. Soekarno, dimana Indonesia harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bersama, sehingga perbedaan-perbedaan dapat menjamin kebersamaan dan mempunyai sikap dan rasa saling memiliki yaitu Bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenai materi sosialisasi politik dalam hal nilai-nilai politik yang diberikan kepada masyarakat saat ini sangat penting. Secara umum nilai-nilai politik yang dimiliki oleh internal partai sangat baik dimulai dari paham dan ideologi yang dianut oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi politik seharusnya dilakukan secara langsung kepada masyarakat bukan kepada kader saja atau anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, sehingga sasaran atau ketepatan sosialisasi politik kepada masyarakat dapat terwujud dan tercapai.

4.2.3 Cerminan Sikap Yang Disampaikan Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan materi sosialisasi politik memiliki sikap-sikap politik. Sikap-sikap politik yang dimiliki oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yaitu dikarenakan adanya transformasi nilai-nilai politik yang diberikan baik kepada kader internal partai maupun masyarakat umum. Sikap-sikap politik yang ada pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat termaktub dalam *Dasa Prasetya*, visi dan misi partai, dimana DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat selain menegakkan empat pilar kebangsaan juga menentukan sikap politik baik dalam internal partai, stabilitas penyelenggaraan politik dan pemerintahan maupun tuntutan dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sikap politik yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam internal partai adalah mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan *gender*. Sikap politik yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaran politik adalah menegakkan prinsip-prinsip partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan, menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai, memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara dan berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sikap politik yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaran pemerintahan adalah memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agrarian, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta yang terpenting adalah mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sikap politik yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam kepentingan masyarakat umum adalah menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis, kemudian menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat, membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, materi sosialisasi politik berkenaan dengan sikap-sikap politik yang dilakukan berdasarkan atas keputusan dan penetapan

bersama DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai haluan utama dalam sosialisai politik. Jika di daerah, DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat mengambil sikap tergantung suasana dan kondisi yang dibutuhkan baik oleh partai maupun oleh masyarakat umum. Sikap politik yang dibutuhkan oleh partai biasanya berbentuk suatu strategi politik dalam mensosialisasikan politik kepada kader atau anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan di daerah masing-masing untuk dapat menarik massa masyarakat dan *lobbying* politik terhadap partai politik lainnya, sedangkan sikap politik yang dilakukan oleh partai dan yang dibutuhkan masyarakat yaitu berupa realisasi dan pelaksanaan program-program pemerintah, biasanya kader PDI Perjuangan yang berada di DPRD yang mempertahankan dan memperjuangkan sikap politik tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis di atas, pemberian sosialisasi politik berkenaan tentang sikap-sikap politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat terlihat kurang nampak. Hal tersebut dikarenakan minimnya kader PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang ada di DPRD baik provinsi, kabupaten atau kota yang terjun secara langsung kepada masyarakat pada saat reses berlangsung. Sikap-sikap politik lebih bersifat formal dalam arena politik tanpa mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat di Provinsi Jawa Barat beranggapan sikap partai politik yang penuh berada pada partai politik yang mendominasi di pemerintahan daerah tertentu saja walaupun ada disebagian daerah seperti Kabupaten Subang dan Kabupaten Kuningan, dimana kepala daerah dan ketua DPRD dipimpin dari kader PDI Perjuangan, sehingga sebagian besar masyarakat

menilai positif mengenai sikap politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan tersebut.

Secara umum sikap-sikap politik yang ada saat ini khususnya yang ada dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya serta penegakkan hukum masyarakat Provinsi Jawa Barat dinilai sangat diperlukan, dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, masih banyaknya anak terlantar, masih adanya tindak KKN dan lain sebagainya menjadikan sikap-sikap politik yang dilakukan partai politik khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat harus mampu membuat strategi dan menekankan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenai materi sosialisasi politik dalam hal sikap-sikap politik yang diberikan kepada masyarakat saat ini sangat diperlukan, dikarenakan pimpinan baik ditingkat eksekutif dan legislatif baik di provinsi, kabupaten atau kota tidak dipimpin secara penuh oleh PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, walaupun disebagian kabupaten dan kota ada yang dipegang oleh PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Disisi lain rumusan dan kebijakan sikap-sikap politik yang dimiliki oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat pada dasarnya dapat dikatakan sangat baik, semua menuju pada kepentingan bersama khususnya kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Diharapkan peran dan fungsi kader yang menduduki eksekutif di daerah baik kabupaten atau kota, legislatif di tingkat provinsi, kabupaten atau kota dapat mempertahankan sikap-sikap politik yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama DPD PDI

Perjuangkan Provinsi Jawa Barat demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis uraian di atas, sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui materi sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya mengenai sasaran. Muatan materi sosialisasi politik yang dimiliki masyarakat saat ini hanya sebatas pemahaman yang dimiliki dari orang tua, kakek dan nenek mereka saja yang didapatkan dari pengetahuan sejak jaman dahulu yang kemudian mereka sampaikan secara keberlangsungan kepada anak dan cucu mereka, kemudian media massa dan agen sosialisasi lainnya. Paradigma dan ideologi politik serta perubahan nilai-nilai politik yang ada, mereka tidak memahami benar apa yang ada di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat saat ini. Jika dilihat dari muatan materi sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff dimulai dari pengetahuan, nilai-nilai politik dan sikap-sikap politik, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat telah memiliki semuanya bahkan jika dilihat semua aspek itu sangat baik, namun disayangkan yang menjadi kendala yaitu DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memberikan materi sosialisasi politik itu secara penuh hanya kepada kader internal partai bukan kepada masyarakat. Sebenarnya teori yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan idealnya teori yang digunakan dalam sosialisasi politik. Jika saja teori ini diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, maka materi sosialisasi politik ini dapat membantu menambah pengetahuan pendidikan politik di masyarakat Provinsi Jawa Barat secara luas.

4.3 Mekanisme Dalam Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Mekanisme sosialisasi politik adalah cara mentransmisikan atau menyampaikan pengetahuan politik, nilai-nilai politik, dan sikap-sikap politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat umum. Mekanisme sosialisasi politik ini akan mengarah pada keberhasilan mempengaruhi anggota internal partai maupun masyarakat umum pada saat sosialisasi berlangsung. Mekanisme sosialisasi politik tersebut meliputi mekanisme imitasi, instruksi dan motivasi yang ada di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Mekanisme sosialisasi politik tersebut secara rinci berupa peniruan atau tingkah laku, kemudian penjelasan secara langsung dan berupa pengalaman DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat baik dalam prestasi maupun inspiratif dalam memberikan sosialisasi politik masyarakat Provinsi Jawa Barat. Mekanisme sosialisasi politik merupakan strategi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam menarik perhatian masyarakat maupun simpatisan untuk bersama-sama mendukung gagasan dan ideologi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan dari berbagai kalangan masyakat yang ada dimulai dari tingkatan masyarakat bawah, menengah dan atas kemudian kategori masyarakat anak-anak, remaja dan dewasa. Mekanisme sosialisasi politik ini diatur dan direncanakan untuk dapat mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat, sehingga pendidikan politik masyarakat Provinsi Jawa Barat secara umum dapat meningkat.

4.3.1 Peniruan Berupa Tingkah Laku Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melaksanakan mekanisme sosialisasi politik dengan imitasi. Hal tersebut dikarenakan peniruan terhadap tingkah laku anggota-anggota internal partai yang dapat mempengaruhi masyarakat umum dalam sosialisasi politik khususnya pada tingkatan masyarakat yang baru beranjak remaja untuk ikut dalam berpartisipasi politik. Mekanisme sosialisasi politik yang diberikan berupa imitasi atau peniruan tingkah laku pada Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebenarnya perlu namun tidak begitu di kedepankan. Hal tersebut dikarenakan anggota internal partai maupun kader Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memiliki perilaku atau gaya dan ciri khas masing-masing. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam hal muatan mekanisme sosialisasi politik lebih mengedepankan karakter daripada imitasi, sehingga karakter yang diformatkan tentang standar kepemimpinan atau standar kader pada Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat itu penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, mekanisme sosialisasi politik berkenaan dengan imitasi dapat diketahui bahwa imitasi di daerah khususnya DPC PDI Perjuangan di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan khususnya karakter dari PDI Perjuangan yang ada di daerah-daerah, misalnya di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang telah mengukir prestasi seperti apa,

bagaimana strategi dan melakukannya. Hal tersebut dapat menginspirasi DPC PDI Perjuangan di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat lainnya yang juga mencoba bagaimana untuk mengadopsi atau menjadikan pedoman DPC PDI Perjuangan lainnya. Contoh lain misalnya di Kabupaten Majalengka perolehan suara dan kursi di pemerintahan terbanyak. Hal tersebut menjadi insiatif para DPC PDI Perjuangan di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga mulai adanya pembenahan dan perbaikan restrukturisasi kader, kemudian melihat potensi, kemampuan dan peran dari kepala daerah serta DPRD. DPC PDI Perjuangan di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dapat menyusun strategi dan motif yang dilakukan, mencoba, memotret dan memproyeksikan kemudian melihat secara keseluruhan paling tidak bisa mengikuti kesuksesan yang telah ada.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis uraian di atas, sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme sosialisasi politik berupa imitasi atau peniruan tingkah laku dapat dikatakan sangat penting. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat prestasi dan karakter yang dimiliki oleh anggota kader DPD maupun DPC kabupaten atau kota PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat, sehingga proses imitasi tersebut dapat diterapkan oleh semua kader DPD maupun DPC PDI Perjuangan kabupaten atau kota yang ada. Jika diamati di lapangan sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat berupa imitasi, sebenarnya sangat diperlukan seperti yang dikemukakan oleh Guru Besar Universitas Padjajaran dan Pimpinan Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia, masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata pendidikan kelas 2 SD dan disatu sisi kemudian budaya politik masyarakat

Provinsi Jawa Barat yang egaliter atau budaya panutan, budaya bapak, budaya paternalis, sehingga masyarakat Provinsi Jawa Barat melihat yang lebih tinggi dan memiliki kapasitas yang lebih dan dapat termotivasi dan terinspirasi. Masyarakat Provinsi Jawa Barat saat ini hanya pengikut saja, mengimitasi dan meniru orang lain terutama para pejabat-pejabat yang ada, sehingga imitasi yang dilakukan oleh partai politik khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat itu perlukan.

4.3.2 Instruksi Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melaksanakan mekanisme sosialisasi politik dengan instruksi. Sosialisasi politik dalam hal instruksi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan penjelasan yang wajib disampaikan sebagai arah tujuan partai mengenai hal-hal yang mendasar, muatan dan isi yang disampaikan dalam sosialisasi politik tersebut. Mekanisme sosialisasi politik yang diberikan berupa instruksi atau perintah pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dilakukan hanya pada anggota atau kader interal Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat khususnya kepada DPC kabupaten atau kota, PAC kabupaten atau kota sampai tingkatan ranting dan anak ranting yang nantinya akan secara langsung memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat umum. Instruksi tersebut disampaikan pada saat anggota atau kader internal partai melaksanakan sekolah kader sebagai pendidikan politik yang diberikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada anggota atau kader internal partai sebelum

terjun langsung memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat, kemudian instruksi biasanya diberikan pada saat rapat-rapat internal partai berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, mekanisme sosialisasi politik berkenaan dengan instruksi yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam sosialisasi politik dapat diketahui bahwa instruksi berupa arahan program partai dan ideologi partai yang hendak diberikan kepada masyarakat. PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat muatan instruksi yang disosialisasikan dan harus dilakukan antara lain yaitu isi *Dasa Prasetya* partai atau arahan umum program partai sebagai doktrin perjuangan yang hendak dilakukan, kemudian Pancasila 1 Juni 1945 mengenai kebangsaan, internasionalime atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan serta visi dan misi partai. Hal tersebut dilakukan biasanya pada saat para kader mengikuti sekolah kader, rapat dan musyawarah internal partai dan kongres yang diputuskan bersama ditingkat provinsi maupun pusat, sehingga instruksi lebih banyak dilakukan pada internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis uraian di atas, sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme sosialisasi politik berupa instruksi dapat dikatakan sangat penting. Melihat pada arah atau garis hierarki organisasi dari mulai tingkat provinsi sampai anak ranting itu terstruktur. Instruksi sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI

Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada DPC di kabupaten atau kota, apabila muatan isi dari instruksi tersebut dapat mengenai sasaran langsung kepada masyarakat, maka sosialisasi politik ini sebenarnya sudah dapat diterima oleh masyarakat. Permasalahannya saat ini adalah ketika instruksi yang telah disepakati bersama di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terkadang setelah sampai ke daerah kabupaten atau kota itu kurang tepat, sehingga masyarakat sulit untuk menerima dan menyerapnya. Instruksi yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebaiknya ada pemetaan atau *mapping* program, sehingga instruksi atau arahan dan tujuan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam hal sosialisasi politik dapat mengenai sasaran kepada masyarakat.

4.3.3 Motivasi Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melaksanakan mekanisme sosialisasi politik dengan motivasi. Sosialisasi politik dalam hal motivasi yang diberikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk tingkah laku yang tepat dipelajari melalui proses belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan dengan sikap-sikap baik dalam prestasi maupun inspiratif dalam memberikan sosialisasi politik masyarakat Provinsi Jawa Barat. Mekanisme sosialisasi politik yang diberikan berupa motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian sosialisasi politik tersebut. Motivasi yang diberikan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari hasil output, proses pengkaderan dan transformasi terhadap nilai-nilai politik yang

dapat diterima oleh masyarakat umum. Motivasi yang diberikan dapat dilihat dari adanya tokoh-tokoh politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan berbagai prestasi dan jejak rekam politik yang baik khususnya dalam pemerintahan baik pusat maupun di tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, mekanisme sosialisasi politik berkenaan dengan motivasi ditingkat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari tokoh-tokoh politik yang ada misalnya Bapak Rudi Harsa mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Bapak TB. Hasanuddin sebagai Plt.Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang selalu memotivasi dengan prestasi yang dimilikinya, kemudian Bapak Teten Masduki kader PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai tokoh masyarakat yang selalu memotivasi, kader muda PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang masyarakat kenal misalnya Ibu Rieke Diah Pitaloka, Bapak Ara Mauarar Sirait dan sebagainya.

Gambar 4.5
Tokoh Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat
Bapak Rudi Harsa



Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi

Gambar 4.6
Tokoh Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat
Bapak Ara Mauarar Sirait



Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang

Mekanisme sosialisasi politik PDI Perjuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan motivasi dapat dilihat juga dari tokoh-tokoh politik daerah misalnya di Kabupaten Bandung ada Bapak H. Yadi Srimulyadi dan Pak Eriyadi (Alm) sebagai kader terbaiknya. Kabupaten Subang ada Bapak Eep Hidayat, Bapak Maman dan saat ini Bapak Ojang sebagai akder terbaik PDI Perjuangan Kabupaten Subang yang dapat memperjuangkan nilai-nilai politik partai, program partai dan visi misi partai, sehingga eksistensi Kabupaten Subang dapat menjadi daerah domisili Partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Kota Cimahi ada Bapak H. Mitra Jumena dan Bapak H. Cece, serta Kabupaten Sukabumi ada Bapak Adi Budi Hidayat dan Bapak Wahyudin Aziz. Motivasi yang dilakukan dalam sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan saat ini untuk mengangkat eksistensi kembali PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Motivasi yang diberikan bagi kader internal partai berupa strategi dan semangat dalam menjaring masyarakat, sedangkan bagi masyarakat motivasi yang diberikan biasanya berupa meyakinkan masyarakat itu sendiri mengenai pelaksanaan program partai dengan

alasan dukungan dan bersama masyarakat itu sendiri bahwa pembangunan dan pemerataan yang berkeadilan di Provinsi Jawa Barat dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenai mekanisme sosialisasi politik berupa motivasi dapat dikatakan cukup baik. Di Provinsi Jawa Barat khususnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat banyak sekali tokoh-tokoh dan elit politik yang berkibar dengan jam terbang nasional yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk memotivasi baik kader atau anggota internal partai dan masyarakat dalam hal sosialisasi politik. Sebagian besar tokoh dan elit politik yang ada mereka hanya terfokus dipusat bukan pengembangan dan pengenalan daerah, sehingga jika dilihat dari kondisi saat ini para tokoh dan elit politik tersebut hanya ada pada saat suasana tertentu saja misalnya dalam pemenangan ketua dewan pimpinan daerah partai, pileg, pemenangan cagub dan cawagub, pemenangan pilbup dan pilwalkot saja, padahal jika motivasi tersebut dilakukan secara *continue*, maka semangat, strategi dan perjuangan sosialisasi politik ini dapat tercapai khusunya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis uraian di atas, sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan sangat penting dan belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Imitasi yang diperlukan misalnya hanya untuk mencari sosok karakter, sehingga bentuk prestasi dapat menjadi contoh dalam upaya sosialisasi politik kepada masyarakat. Instruksi mengenai program-program partai, ideologi partai maupun arah tujuan

partai sebenarnya dalam hierarki organisasi telah dilakukan melalui rapat internal, musyawarah partai dan kongres, namun ketika instruksi tersebut hendak akan disosialisasikan sedikit ada kendala misalnya ada beberapa daerah yang membutuhkan strategi agar materi sosialisasi atau mekanisme sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ini tercapai, sehingga instruksi yang seharusnya dijalankan sesuai musyawarah tersebut menjadi berubah ketika di lapangan. Motivasi yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terlebih oleh tokoh-tokoh dan elit politik, sangat minim. Tokoh dan elit politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya terfokus dikancah nasional dan pusat saja sekalipun ada memberikan arahan, masukan dan motivasi baik kepada kader internal partai maupun masyarakat secara langsung hanya pada saat tertentu saja, sehingga saat ini sebenarnya motivasi khususnya kepada kader atau anggota internal partai sangat dibutuhkan terlebih dalam hal sosialisasi politik kepada masyarakat.

4.4 Pola Dalam Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Pola sosialisasi politik adalah cara penyampaian materi dan mekanisme sosialisasi politik dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam hal melakukan proses sosialisasi politik kepada masyarakat umum. Pola sosialisasi politik ini akan mengarah pada keberhasilan mempengaruhi anggota internal partai maupun masyarakat umum pada saat sosialisasi berlangsung. Pola sosialisasi politik tersebut dipengaruhi oleh pemerintah seperti

KPU dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) baik dipusat maupun di daerah dan partai politik seperti DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Pola sosialisasi politik tersebut meliputi pola repsresif dan pola partisipatoris.

4.4.1 Pola Repsresif Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menerapkan pola sosialisasi politik dengan repsresif. Pola repsresif yang digunakan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai penekanan formal pada internal partai untuk mengikuti kesepakatan, aturan, arah kebijakan dan perjuangan partai dalam hal memberikan sosialisasi politik seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.7
Rapat Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat
Bersama Kader Kabupaten dan Kota PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dokumen Pribadi di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

Pola repsresif ini ditekankan pada penggunaan materi sosialisasi politik yang akan disampaikan kepada anggota internal partai maupun simpatisan yang bersifat satu arah dan *nonverbal*. Pola sosialisasi politik yang diberikan berupa repsresif pada Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yaitu suatu tuntutan

yang harus dilaksanakan oleh anggota internal partai atau kader Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan aturan, arah kebijakan dan perjuangan partai. Pola tersebut diterapkan pada materi sosialisasi politik misalnya dimana muatan pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tersebut harus sesuai dengan cita-cita dan arah perjuangan partai yaitu untuk memakmurkan dan mensejahteraan rakyat. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menekankan hal tersebut sebagai upaya keberhasilan partai yang tepat sasaran dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, pola sosialisasi politik berkenaan dengan pola repsresif ditingkat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya bersifat pada internal partai saja tidak secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat bebas memilih hak politiknya kepada siapapun dan bendera partai manapun tanpa ada paksaan dengan penekanan-penekanan tertentu. Doktrinasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya mengarah pada arahan umum program partai sebagai doktrin perjuangan yang isinya pun bukan sesuatu hal yang memaksa akan tetapi garis-garis besar haluan partai yang memprioritaskan kepentingan publik diatas segala-galanya. Arah program PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tersebut yaitu menegakkan empat pilar kebangsaan, budaya gotong royong, perkuatan basis ekonomi kerakyatan, transparansi pelayanan publik,

reformasi birokrasi, demokratis dan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia. PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk sebuah pemenangan dan tujuan partai memiliki *reward* dan *punishment*. Hal tersebut tidak dapat lepas dari aturan seperti yang sudah diatur dalam AD/ART organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong para kader, kemudian yang diharapkan dari kader-kader tersebut apabila ada yang menghambat biasanya atau kader yang tidak konsisten terhadap aturan dan segala macam dan menjadi hambatan, maka *punishment* berupa peringatan dan sanksi diterapkan, karena untuk mencapai suatu tujuan partai, sesungguhnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memiliki *frame* dan aturan.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenai pola sosialisasi politik berupa repsresif dapat dikatakan cukup baik dalam internal partai. Ketegasan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini sangat diperlukan karena sebelum ke masyarakat akan terlebih dahulu pola sosialisasi politik diberikan kepada kader partai khususnya DPD dan DPC PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai pelaku utama dalam sosialisasi politik. Terkadang ada saja kader maupun anggota partai yang tidak memahami benar apa muatan isi materi dan mekanisme sosialisasi politik tersebut, sehingga ketika di lapangan pada saat sosialisasi politik tersebut diberikan kepada masyarakat muatan atau isi materi sosialisasi politik tersebut tidak tersampaikan dan akhirnya masyarakat hanya di doktrinasi agar memilih dan mempertahankan kemenangan partai.

4.4.2 Pola Partisipatoris Dalam Sosialisasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menerapkan pola sosialisasi politik dengan partisipatoris. Pola partisipatoris yang digunakan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sebagai pola yang penekanannya diletakan pada interaksi, komunikasi dua arah yaitu partai sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan yang menjadi pusat sosialisasi, dimana keperluan masyarakat itu dianggap penting. Pola sosialisasi politik yang diberikan berupa partisipatoris pada PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan hal yang wajib dan harus dilaksanakan oleh partai. Pola tersebut dibagi menjadi dua yaitu ada pola partisipatoris yang dilakukan kepada anggota atau kader internal partai dan masyarakat umum. Hal tersebut dapat menggambarkan hubungan yang baik antara PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dengan internal partai dan masyarakat umum. Pola partisipatoris dalam hal sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengarah pada penyerapan aspirasi.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenal tiga pilar eksekutif, legislatif dan struktur partai, dimana diantara ketiganya saling berkoordinasi satu dan yang lainnya. Sebagai contoh di Kuningan, PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mempunyai kepala daerah bupati dan wakil bupati dan di legislatif mempunyai anggota DPRD 14 (empat belas) orang, kemudian ketua DPRD dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Struktur Partai PDI Perjuangan di daerah kabupaten atau kota tingkatannya dari DPC, PAC, ranting sampai anak ranting,

secara *continue* melakukan pertemuan dan berkoordinasi, maka pola partisipatoris dalam internal Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terbentuk.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memiliki kader di parlemen atau legislatif sesuai dengan tingkatan baik di pusat maupun di daerah. Pada masa reses tersebut kader DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melakukan serap aspirasi kepada masyarakat, pola sosialisasi apa yang sudah dilakukan dalam sekian tahun atau sekian bulan dan apa yang diinginkan masyarakat dengan hasil tersebut. Serap aspirasi akan dibawa dalam masa persidangan di parlemen dan ini merupakan salah satu proses pola sosialisasi politik kepada masyarakat yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Proses sosialisasi dengan pola tersebut dapat meyakinkan masyarakat pada pemilu selanjutnya. Partai dan kader partai yang berada di parlemen dapat memberikan dampak positif dan penilaian baik dari masyarakat, sehingga apa yang diperjuangkan partai dan harapan serta tuntutan rakyat terpenuhi. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen ketika kampanye pemilu dapat menyakinkan masyarakat dengan memperjuangkan cita-cita dan arah tujuan partai demi kepentingan masyarakat serta memperjuangkan nilai-nilai partai, sesungguhnya ketika terpilih ada masanya untuk turun kepada konstituen untuk melakukan serap aspirasi untuk diperjuangkan kembali dimasa persidangan selanjutnya dan memberikan pengarahan dan penjelasan yang sudah diperjuangkan berikut dengan program kerja nyatanya. Serap aspirasi dimaksudkan agar masyarakat mampu memberikan tuntutan kepada Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan

masyarakat melakukan dialog, maka saat itulah berbagai macam penjelasan tentang tuntutan aspirasi tersebut dijelaskan oleh Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan pola sosialisasi politik kepada masyarakat terbentuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, pola sosialisasi politik berkenaan dengan pola partisipatoris sangat ditekankan khususnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Bagi pengurus DPC PDI Perjuangan di kabupaten atau kota mengerahkan dari tingkat kecamatan yaitu PAC sampai RT dan RW anak ranting. Di tingkat RW ini masing-masing ditugaskan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan misalnya dalam birokrasi, kesehatan atau apapun, karena PDI Perjuangan mempunyai fraksi dan fraksi ini bisa difungsikan untuk penyambung tangan dari partai. PDI Perjuangan memberikan delegasi atau memberikan peluang kepada kadernya untuk menjadi anggota dewan, dengan anggota dewan ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang memilih, maka harus diberikan pemahaman yang menjadi keinginan masyarakat.

Secara umum tidak ada bedanya antara sosialisasi yang disampaikan DPD kepada DPC begitu kepada tingkatan bawah sampai nantinya kepada masyarakat. DPD ini bagian organisasi secara nasional di tingkat provisni yang hanya melaksanakan garis-garis organisasi yang telah digariskan oleh DPP begitu pun DPC. Jika dilihat dari suasana dan kondisi pada masyarakat saat ini, mungkin yang perlu di intensifkan adalah komunikasi politik, khusunya *pertama* kepada

kader-kader yang agak sedikit kurang lancar karena di organisasi itu biasa ada pergantian atau masa transisi. *Kedua* adalah masyarakat, dalam konteks ini biasanya yang paling kompleks dan sulit untuk diatur dimulai dari materi yang disosialisasikan tidak mudah diterima dan dipahami, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja baik DPD dan DPC PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sampai tingkat anak ranting mudah-mudahan kedepan kondisi apapun di internal di PDI Perjuangan baik di DPD maupun di DPC tidak menganggu stabilitas komunikasi dan kinerja partai khususnya dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengenai pola sosialisasi politik berupa partisipatoris dapat dikatakan cukup baik, namun perlu strategi-strategi politik lainnya untuk dapat menjaring dan menarik perhatian masyarakat lebih banyak, sehingga masyarakat dapat tertarik dan dapat menerima sosialisasi politik yang diberikan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Pola sosialisasi politik yang tepat sasaran sebenarnya bukan hanya sebatas merujuk pada pemenangan partai saja. Pola sosialisasi politik itu bagi partai-partai adalah bagaimana cara menyebar luaskan ideologi kepada masyarakat. *Kedua* bagaimana menyebarluaskan gagasan-gagasan kedepan kepada masyarakat. *Ketiga* menyangkut bagaimana menyebarkan fenomena-fenomena yang berakibat pada kebangkitan partai dari masyarakat. Tentunya gagasan-gagasan tersebut sudah terpola, sudah ditetapkan dan dikembangkan, maka itu saat ini muncul kekuatan politik bukan dari partai saja melainkan dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis uraian di atas, sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui pola sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan masih sangat penting dan belum sepenuhnya mengenai sasaran masyarakat. Umumnya sekarang pada pola sosialisasi politik yang dilakukan dalam sosialisasi politik oleh partai politik pada masyarakat itu tidak dibangkitkan. Seharusnya sosialisasi itu mendengarkan dan kemudian membangkitkan gagasan-gagasan politik yang disampaikan, sehingga masyarakat itu bangkit dan mengerti apa yang disampaikan dalam konteks politik. Sosialisasi politik yang disampaikan berakibat kepada masyarakat yang mendengarkan dan kemudian berakibat melakukan pada tindakan lanjutan. Pola sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam hal sosialisasi politik itu penting, akan tetapi yang lebih penting lagi bagaimana ideologi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang disosialisaikan itu bisa membangkitkan masyarakat. Salah satu strategi bagaimana pola sosialisasi politik dapat tercapai adalah melalui *marketing politic* bagaimana DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mampu mempromosikan program dan gagasan politik yang ada. Program dan gagasan tentu harus menarik bagi masyarakat, sehingga akan ada *feedback* yang didapatkan dari masyarakat. Jika program dan gagasan itu tidak menarik untuk masyarakat, maka sosialisasi politik yang dilakukan kepada masyarakat akan berlalu begitu saja, salah satunya adalah komunikasi untuk memasarkan gagasan dan ideologi politik yang mengakibat masyarakat kurang memahami esensi materi sosialisasi politik dimulai dari pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik pada saat sosialisasi politik berlangsung.